

## PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN GAJI (SIMGAJI) DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KOTA BONTANG

Sriwahyu Dyah Indarsari<sup>1</sup>, Adri Patton<sup>2</sup>, Muhammad Noor<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Alamat Korespondensi: [adri.patton@fisip.unmul.ac.id](mailto:adri.patton@fisip.unmul.ac.id)

**ABSTRACT :** *The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Salary Management Information System (SIMGAJI) at the Office of the Regional Financial and Asset Management Agency of the Bontang City Government and to identify what are the inhibiting factors in the implementation of the Salary Management Information System (SIMGAJI) at the Office of the Regional Financial and Asset Management Agency of the Bontang City Government. This research uses a qualitative descriptive approach using primary and secondary data, and the analysis used is interactive model analysis. This study concludes that the application of the Salary Management Information System (SIMGAJI) in the early stages of SIMGAJI (input) in providing basic needs as a whole is good enough because the resources owned are mostly adequate both human, financial, facilities, machines and methods. Then for the process stage consisting of the planning stage carried out is the determination of operators, preparing SOPs, integrating data can be implemented properly. However, at the organizing stage, there are still obstacles in filing or there are still admins who are not optimal in doing their tupoksinya. At the output stage of SIMGAJI, namely recap and payroll, Certificate of Termination of Payment (SKPP), Annual Tax Return, this has achieved the main goal of implementing SIMGAJI by the Bontang City Government, which is to facilitate salary management for civil servants and minimize errors.*

**Keyword:** *Salary Management Information System (SIMGAJI), Input, Process, Output.*

**ABSTRAK :** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bontang dan untuk mengidentifikasi apa saja yang menjadi faktor penghambat penerapan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan skunder, serta analisis yang dipergunakan adalah analisis model interaktif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) pada tahap awal dari SIMGAJI (input) dalam penyediaan kebutuhan dasar secara keseluruhan sudah cukup baik karena sumberdaya yang dimiliki sebagian besar telah memadai baik manusia, keuangan, sarana, mesin dan metode. Kemudian untuk tahap proses yang terdiri dari tahap perencanaan yang dilakukan adalah penetapan operator, mempersiapkan SOP, mengintegrasikan data dapat dilaksanakan dengan baik. Namun pada tahap pengorganisasian masih terdapat kendala dalam pemberkasan atau masih juga ada admin yang tidak maksimal dalam melakukan tupoksinya. Pada tahap luaran (output) dari SIMGAJI yaitu rekap dan daftar gaji, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), SPT Pajak Tahunan, hal ini telah mencapai tujuan utama dari penerapan SIMGAJI oleh Pemerintah Kota Bontang yaitu dapat mempermudah tatakelola gaji bagi pegawai ASN dan meminimalisir terjadinya kesalahan.

Kata Kunci : SIMGAJI, Masukan, Proses, Luaran.

## Pendahuluan

Sistem informasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan pemerintahan berfungsi untuk membantu kelancaran tugas yang menjadi unsur pendukung dalam pelaksanaan fungsi dari manajemen. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut akan mampu meningkatkan efektifitas berbagai aspek pengelolaan informasi yang ditunjukkan oleh kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan, serta ketelitian dan kebenaran informasi (validates) yang dihasilkan dalam menunjang kinerja Pemerintah. Hal ini berkaitan dengan penggunaan perangkat keras komputer (hardware), program aplikasi pendukung (software), perangkat komunikasi dan internet sebagai sarana pengelolaan data dan informasi. Sehingga dengan pengolahan data yang baik yang diolah sedemikian rupa senantiasa dapat mengatasi masalah yang terjadi dan dapat menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Dengan adanya informasi yang lengkap dan berkualitas serta pengelolaan yang profesional maka akan menambah keunggulan dalam pengambilan keputusan (Suripatty, 2020).

Salah satu sistem informasi yang saat ini diterapkan oleh Pemerintah dalam menunjang kinerjanya adalah Sistem Informasi Manajemen Penggajian (SIMGAJI) hal ini ditujukan untuk mencegah kesalahan saat menghitung pengeluaran penggajian. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari (Efendi, 2020) yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi SIMGAJI Pemerintah yang diterapkan di semua wilayah sebagai sarana untuk menghitung, menyimpan, dan memelihara data pegawai negeri sipil berdasarkan komputerisasi dan terhubung ke jaringan internet milik pemerintah. Selain itu juga sistem ini juga akan dapat lebih efisien

dalam memanfaatkan sumberdaya manusia, waktu dan tenaga tetap terjaga, terwujudnya akurasi data dan informasi kepegawaian dan keuangan, tersedianya database kepegawaian dan keuangan setiap PNS.

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari sistem ini menurut (Wahidah, 2021) yaitu lebih cepatnya penyampaian laporan realisasi pembayaran gaji kepada pegawai. Selain itu juga, melalui aplikasi yang terintegrasi ini, dapat dijadikan sebagai dasar penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) kepada Pemerintah Daerah mengenai seberapa besar anggaran yang disiapkan Pemerintah Pusat, membayar gaji PNS setiap bulan di daerah. Begitu juga dengan proses penerbitan daftar gaji PNS kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan mulai dari setting, input, proses, hingga hasil/output berupa daftar gaji PNS yang akan dijadikan dasar pembayaran gaji setiap bulannya". Keunggulan tersebut sejalan dengan pendapat dari (Mulyani et al., 2020) yang menyatakan bahwa pembuatan sistem informasi penggajian menghasilkan sebuah sistem yang dapat mempermudah untuk tahap perhitungan gaji, meliputi perhitungan hari kerja, perhitungan lembur dan insentif-insentif yang biasa diterima serta pembuatan slip gaji secara otomatis, sehingga menghasilkan informasi yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan peneliti, ada beberapa hal yang dapat menghambat kinerja dalam pengelolaan gaji jika tidak melakukan penerapan Sistem Informasi Manajemen Gaji sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Taman, 2019) yang menyatakan bahwa dengan melakukan perhitungan gaji pegawai masih menggunakan kalkulator/manual, pengelolaan penggajian belum efektif dan efisien karena pengelolaan gaji tersebut rentan terjadi kesalahan perhitungan dan lambatnya dalam pembuatan laporan penggajian. Begitu juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Suripatty, 2020) yang menyatakan bahwa pengolahan data gaji pegawai yang dijalankan masih manual berakibat dalam pengolahan data gaji pegawai dan pembuatan laporan menjadi kurang efektif.

Oleh sebab itu, pentingnya pengelolaan sistem informasi penggajian yang didukung oleh sistem informasi untuk mempermudah perusahaan/organisasi dalam manajemen waktu dan keamanan terhadap perhitungan maupun keamanan data penggajian dan menyajikan informasi yang akurat untuk tiap pegawai/karyawan (Hamizan et al., 2020). Selain itu juga, sistem informasi gaji pegawai yang dibangun dapat membantu pembuatan rekap gaji pegawai dan meminimalisir tingkat kesalahan dalam transaksi serta mempercepat pembuatan laporan gaji pegawai (Podungge & Widanta, 2020).

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pengelola seluruh gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Sejak tahun 2019 juga telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI) sebagai pengganti SIMGAJI sebelumnya.

Namun sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya juga digambarkan bahwa selain keunggulan dari penerapan SIMGAJI tersebut, juga ditemukan beberapa kendala dan hambatan dalam penerapannya, hal ini dapat diidentifikasi dari hasil observasi peneliti pada obyek penelitian dan ditemukan bahwa adanya temuan dari

BPK pada tahun 2020 terhadap kelebihan pembayaran tunjangan umum dan tunjangan fungsional untuk PNS yang tugas belajar, selain itu juga sering diketemukan kekurangan pembayaran tunjangan fungsional/ umum/ struktural bagi PNS yang mengambil cuti besar. Bahkan ada pembayaran kelebihan pembayaran bagi gaji bagi PNS yang terkena hukuman disiplin.

**Tabel 1**  
**Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran Tunjangan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang (2019-2022)**

TAHUN	CUTI BESAR			TUBEL		HUKDIS	
	JUMLAH PNS CUTI	KELEBIHAN INPUT BULAN	SESUAI PERHITUNGAN	JUMLAH PNS TUBEL	KELEBIHAN INPUT	JUMLAH PNS HUKDIS	KELEBIHAN INPUT
2019	34	18	16	0	0	0	0
2020	20	9	11	10	10	5	3
2021	23	3	20	0	0	0	0
2022	36	3	25	0	0	0	0

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa Pada tahun 2019 terdapat 18 orang dari 34 orang mengajukan cuti besar, yang kelebihan bulan dalam cuti besar, sehingga PNS tersebut tidak mendapatkan tunjangan fungsional/struktural/umum selama beberapa bulan. Pada tahun 2020 - 2021 mengalami penurunan jumlah PNS yang mengalami hal tersebut. Dampak dari kelebihan bulan cuti besar tersebut, pemerintah membayar kekurangannya/rapel tunjangan kepada PNS tersebut.

Adanya temuan pemeriksaan dari tim BPK pada tahun 2020 bahwa ada 10 orang PNS yang kelebihan pembayaran tunjangan umum/fungsional untuk pegawai yang tugas belajar dikarenakan secara administrasi terlambatnya SK tugas belajar yang diterima dari pihak BKPSDM ke BPKAD. Hasil dari temuan tersebut maka pihak PNS yang kelebihan pembayaran tunjangan tersebut wajib mengembalikan ke kas daerah dibuktikan dengan surat tanda setoran (STS). Pada tahun 2020 ada 5 orang PNS yang terkena hukuman disiplin, namun ada 3 orang yang kelebihan pembayaran gajinya, dikarenakan secara administrasi terlambatnya SK hukuman disiplin yang diterima dari BKPSDM ke BPKAD. Akibatnya pihak PNS yang mengalami kelebihan pembayaran gaji tersebut wajib mengembalikan ke kas daerah dibuktikan dengan surat tanda setoran (STS).

Berdasarkan fenomena empirik di atas dapat diketahui bahwa penerapan system informasi gaji di kantor BPKAD Kota Bontang masih banyak terjadi kesalahan dan akan berimplikasi pada banyak hal jika tidak dilakukan perbaikan. Penelitian ini akan mencoba untuk menggali lebih dalam terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi kelemahan dalam penerapannya sebagaimana tujuan dari penggunaan SIMGAJI tersebut.

### **Kerangka Teori**

#### **Sistem Informasi Manajemen**

Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan guna mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan dan terorganisir, sehingga mendukung proses pengambilan keputusan. SIM adalah system yang terdiri atas perangkat lunak, hardware, data, prosedur dan personal yang terintegrasi dengan tujuan menghasilkan informasi yang diperlukan (Yoraeni, 2023). Heyel dalam Kustina (2022:38) mengatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah pendekatan yang terencana dan terorganisir untuk memasok eksekutif dengan alat bantu canggih, guna memfasilitasi proses manajerial.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis model Interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014).

### **Hasil Penelitian**

#### **Penerapan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI)**

##### **1.Masukan (Input)**

Masukan/input merupakan bagian awal dari sistem yang menyediakan kebutuhan (sumber daya) operasi bagi sistem, hal ini terdiri dari :

##### **a).Men (Sumber Daya Manusia)**

Sumber daya manusia merupakan unsur yang penting karena manajemen dibuat oleh orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Manusia sebagai pembuat tujuan dan juga yang melakukan proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Sumber daya manusia yang diperlukan yaitu yang memiliki kompetensi atau pengetahuan dan keterampilan yang sesuai, sehingga sumber daya manusia tersebut menghasilkan kinerja yang maksimal.

Jumlah sumber daya manusia yang menjalankan SIMGAJI pada tiap OPD berjumlah rata-rata 1 (satu) orang, namun untuk OPD yang besar seperti Disdik, RSUD, Dinkes, Dispora membutuhkan pengelola/admin lebih dari satu orang. Secara kuantitas admin SIMGAJI tersebar pada seluruh perangkat daerah yang ada dengan komposisi yang disesuaikan dengan jumlah SDM yang dikelola. Sementara itu, untuk kualitas sumber daya manusianya yang mencakup latar belakang pendidikan dan pendidikan pelatihan yang pernah diikuti.

Berikut ini merupakan salah satu kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi para admin SIMGAJI.



Gambar 1

Dokumentasi Bimtek SIMGAJI

Sumber: Dokumen BPKAD, 2023

Berdasarkan bimbingan teknis tersebut, harapan capaian yang diinginkan tentunya akan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Sebagaimana informasi yang disajikan tersebut, kegiatan bimbingan teknis dalam peningkatan kemampuan juga pernah dilakukan dan telah sesuai dengan harapan.

#### **b).Money (Keuangan)**

Uang merupakan alat tukar atau pengukur nilai, oleh karena itu besar kecilnya suatu kegiatan dapat diukur dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Pemerintah Kota Bontang dalam hal ini BPKAD tidak mengeluarkan biaya untuk membuat aplikasi tersebut. Begitu juga pada biaya perawatan aplikasi SIMGAJI, diketahui tidak ada anggaran khusus dan bahkan tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah hal ini karena semua ditanggung oleh Taspen sebagai pemilik aplikasi SIMGAJI.

#### **c).Material (Sarana)**

Material terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi. Dalam suatu kegiatan, materi bisa jadi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan sesuatu yang penting untuk mendukung menjalankan SIMGAJI. Oleh karena itu berikut ini adalah beberapa sarana yang harus dimiliki oleh OPD dan Taspen untuk menjalankan SIMGAJI berbasis Web.

Temuan penelitian ini diketahui bahwa sarana utama yang dipergunakan untuk menjalankan SIMGAJI yaitu keberadaan koneksi internet yang memadai. Sebagaimana yang telah disampaikan informan tentang standar sarana untuk menjalankan SIMGAJI tersebut. Sebagaimana data hasil penelitian ini diketahui bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh semua OPD untuk menjalankan SIMGAJI telah memadai. Khususnya ketersediaan fasilitas jaringan internet sudah baik dan terpenuhi untuk kebutuhan menjalankan SIMGAJI.

#### **d).Machines (Mesin/Peralatan)**

Dalam suatu kegiatan, mesin diperlukan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dari penelitian ini diketahui bahwa peralatan/mesin pendukung untuk menjalankan SIMGAJI sudah memadai dan jika

terjadi gangguan, maka hal yang dilakukan oleh para admin dapat melakukan koordinasi dengan tim IT Taspen jika yang mengalami gangguan jaringan atau aplikasinya dan menggunakan laptop/pc lainnya jika yang bermasalah peralatannya. Selain itu jika terjadi gangguan perangkat keras, maka perangkat daerah telah memiliki backup, dan jika terjadi gangguan pada perangkat lunak/software maka pihak Taspen akan berkoodinasi dengan server pusat.

#### e).Method (Metode)

Di dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja yang berisi prosedur atau tata cara yang diperlukan untuk memperlancar jalannya pekerjaan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan sistem SIMGAJI juga memiliki SOP untuk menjalankan sistem tersebut. Berikut ini contoh halaman awal SIMGAJI berbasis Web untuk user melakukan login dan disertai dengan password. Begitu juga dengan keberadaann SOP, maka pejabat yang langsung bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaannya.



ambar 2

Halaman Awal Login SIMGAJI Taspen

Sumber : Website Simgaji Taspen

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada fase awal dari SIMGAJI dalam penyediaan kebutuhan dasar secara keseluruhan sudah cukup baik karena sumberdaya yang dimiliki sebagian besar telah memadai baik manusia, keuangan, sarana, mesin dan metode.

#### 2.Proses (Aktivitas)

Tahapan ini berupa kegiatan proses, alat, tindakan, teknologi, dan kegiatan yang bertujuan sebagai implementasi program, hal tersebut dimulai dari :

##### a).Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah proses merumuskan masalah, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menentukan tujuan, serta menyusun langkah praktis untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut proses perencanaan untuk menjalankan SIMGAJI yaitu sebelum melakukan integrasi data terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak PT Taspen selaku pemilik aplikasi serta BKPSDM sebagai penyedia data pegawai dan BPKAD sebagai user. Selain itu dalam proses perencanaan dalam menjalankan SIMGAJI melalui Bagian umum dan Kepegawaian dan Bagian Perencanaan Keuangan OPD. Bagian Umum



melakukan persiapan berupa pengecekan apakah ada data pengusulan KP4, Persetujuan Surat Cuti Besar, SK Kenaikan Pangkat dan atau SK Kenaikan Gaji Berkala dan bagian perencanaan yang menghitung anggarannya. Kemudian dalam perencanaan tersebut juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan di dalamnya.

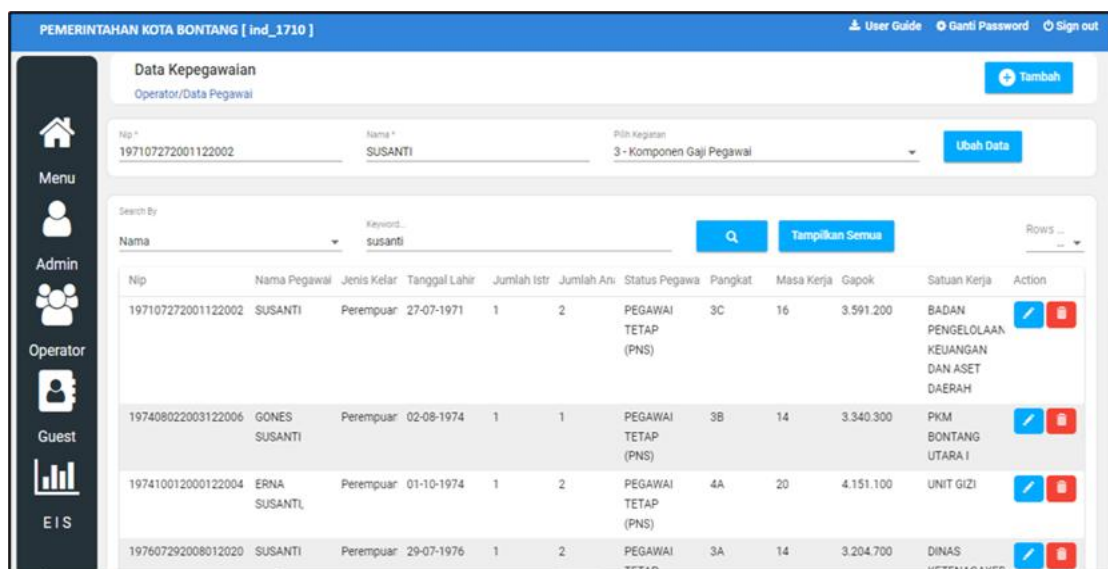
Berdasarkan hasil penelitian, tahap perencanaan hal yang dilakukan adalah penetapan operator/pengelola SIMGAJI pada perangkat daerah, setelah menyiapkan SOP termasuk pengawasan dan kemudian melakukan pendampingan dalam integrasi data yang melibatkan PT Taspen selaku pemilik aplikasi serta BKPSDM sebagai penyedia data pegawai dan BPKAD sebagai user.

**b).Pengorganisasian**

Pada tahapan ini kegiatan pekerjaan diantara anggota kelompok dan membuat ketentuan dalam hubungan-hubungan yang diperlukan. Pengorganisasian merupakan langkah untuk menetapkan, menggolongkan, menetapkan macam-macam kegiatan serta mengatur pembagian tugas dan wewenang. Sebagaimana hal tersebut, langkah awal untuk melakukan pengorganisasian tentunya memerlukan struktur organisasi yang akan mengelola kegiatan SIMGAJI. Disini peran BPKAD sebagai tim verifikator sedangkan OPD sebagai admin SIMGAJI kemudian penginputan dilakukan oleh pengelola kepegawaian dengan berkoordinasi dengan Kasubag Umpeg.

Selain itu juga dalam hal ini BPKAD melakukan pendampingan kepada OPD selaku admin SIMGAJI dan BKPSDM yang mempunyai database kepegawaian sedangkan OPD sebagai pembuat daftar gaji yang menginput data seperti Sk Mutasi, Kgb, dan Kenpa.

Berikut ini adalah contoh proses input data dengan menggunakan SIMGAJI sebagaimana gambar di bawah ini :



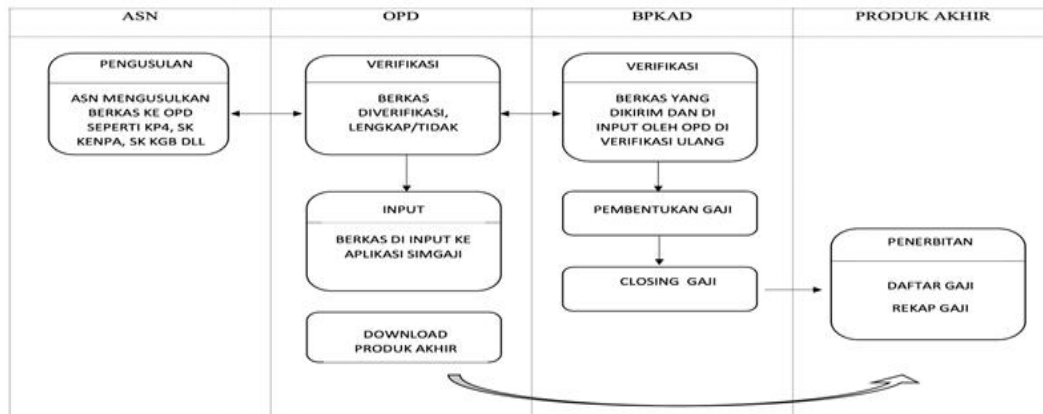
Gambar 3  
Contoh Proses Input Data Pada SIMGAJI Taspen



Sumber : Website SIMGAJI Taspen

Selain itu juga ada struktur kerja dalam proses/mechanisme kerja dalam pengelolaan SIMGAJI dari tahap input database verifikasi sampai dengan pengawasannya. Walaupun secara struktur dalam pengorganisasian tidak terdapat kendala, namun dalam prakteknya masih juga terdapat kendala dalam pemberkasan atau masih juga ada admin yang tidak maksimal dalam melakukan tupoksinya. Namun secara keseluruhan keberadaan struktur tersebut memudahkan proses kerja untuk mencapai tujuan.

Berikut ini adalah alur kerja SIMGAJI sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 4  
Alur Kerja SIMGAJI  
Sumber : BPKAD, 2023

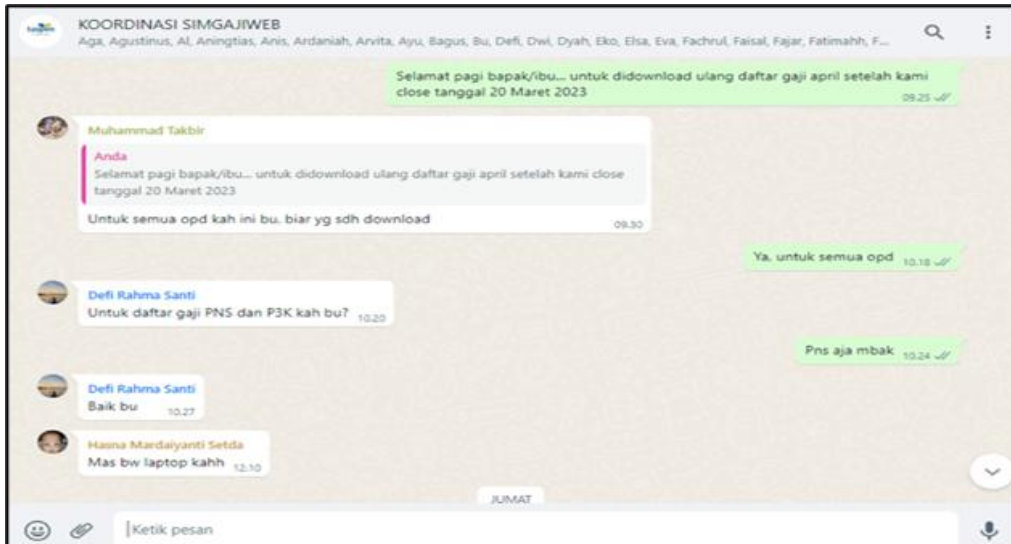
Pada tahap pengorganisasian dapat dilakukan dengan adanya struktur alur kerja yang mempermudah koordinasi antar bagian dan secara umum uraian tugasnya adalah menatausahakan daftar gaji perangkat daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

### c).Fungsi pelaksanaan

Hal ini terkait dengan fungsi penggerak semua kegiatan program yang telah ditetapkan pada pengorganisasian untuk mencapai tujuan program yang telah direncanakan. Pelaksanaan lebih menekankan manajer untuk mengarahkan dan menggerakkan semua sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Begitu juga dengan proses kegiatan menggerakkan anggota-anggota kelompok yang ada di dalam struktur pengelola SIMGAJI dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing.

Secara umum dalam proses pelaksanaan diketahui dari hasil wawancara, bahwa peran BPKAD dalam SIMGAJI adalah menjadi super admin dan melakukan pendampingan dalam proses input gaji dan sekaligus menjadi verifikator dari SIMGAJI. Kemudian dalam proses menggerakkan tersebut, upaya yang dilakukan oleh BPKAD sebagai super admin dalam menjalankan SIMGAJI tersebut. Selanjutnya dalam proses menggerakkan juga diperlukan wadah komunikasi antar bagian dengan dibuat WA Grup untuk berkomunikasi antar semua admin dalam SIMGAJI dilingkungan Pemerintah Kota Bontang

Berikut ini contoh Whatsapp Grup (WA Grup) yang dibuat untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan SIMGAJI sebagaimana gambar berikut :



Gambar 5  
 WA Grup SIMGAJI Pemerintah Kota Bontang  
 Sumber : Data Primer, 2023

Kemudian salah satu hal yang dapat memotivasi dalam menjalankan tugas-tugas biasanya diperlukan adanya insentif, namun hasil penelitian ini dari pernyataan para informan diketahui bahwa tidak ada insentif tambahan bagi para pegawai yang menjalankan tugas sebagai admin SIMGAJI karena pada pegawai yang menjadi admin sudah termasuk dalam tugas pokok dan fungsinya.

**d).Pengawasan**

Pada tahapan ini merupakan kegiatan untuk menyesuaikan antara pelaksanaan dan rencana-rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan fungsi yang terakhir dalam proses manajemen. Pengawasan mempunyai kaitan erat dengan fungsi manajemen lainnya, terutama dengan perencanaan. Melalui pengawasan, standar keberhasilan program yang dituangkan dalam bentuk target, prosedur kerja dan sebagainya harus selalu dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau yang mampu dikerjakan oleh staf, dalam hal ini pengawasan dilalukan oleh Kasubbid Belanja Daerah. Sementara itu untuk bentuk pengawasannya dengan melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya. Kemudian juga dilakukan rekonsiliasi setiap bulan, selain berfungsi untuk ceklist data ulang juga bisa dimanfaatkan oleh admin OPD untuk saling bertukar informasi serta membangun koneksi yang baik. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan dalam penerapan SIMGAJI dilakukan langsung oleh BPKAD dengan bentuk pengawasannya dari proses pendampingan penginputan dan verifikasi hasil inputan daftar gaji OPD sampai dengan kegiatan rekonsiliasi dan monitoring.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan yang dilakukan adalah penetapan operator, mempersiapkan SOP, mengintegrasikan data dapat dilaksanakan dengan baik. Namun pada tahap pengorganisasian masih terdapat kendala dalam pemberkasan atau masih juga ada admin yang tidak maksimal dalam melakukan tupoksinya. Pada fungsi pelaksanaan sudah dilakukan dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya kemudian pada tahap pengawasan juga tidak ditemukan kendala dan berjalan dengan baik.

### **3.Keluaran (Output)**

Keluaran (Output) merupakan hasil akhir berupa produk langsung dari kegiatan program, dan juga termasuk tipe, level, dan target pelayanan yang diinginkan oleh program. Produk langsung dari SIMGAJI yaitu rekap dan amprah gaji pegawai yang digunakan sebagai lampiran untuk pembayaran gaji PNS maupun PPPK. Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi Pegawai Pensiun, Meninggal Dunia, Diberhentikan serta Pindah ke Pemda lain. SPT Pajak Tahunan. Back up data gaji pada SIMGAJI dapat digunakan sebagai input untuk pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan pembuatan kode billing otomatis pada Treasury Billing System (TBS).

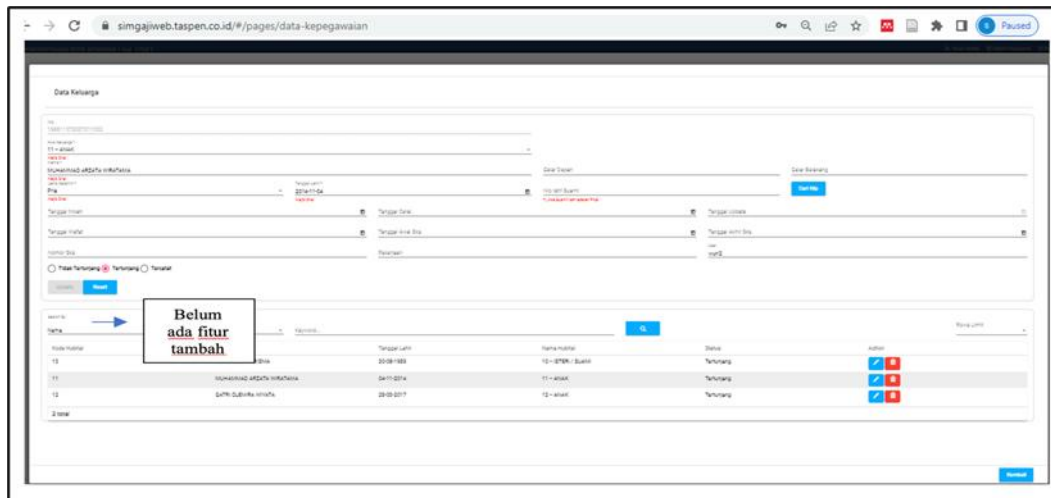
Secara khusus tujuan utama SIMGAJI yaitu merupakan alat bantu yang diharapkan dapat mempermudah dalam pembayaran hak pegawai PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Bontang mulai dari penginputan, penatausahaan, hingga pelaporan. Sejauh ini penerapan SIMGAJI sudah cukup sesuai harapan, dimana perubahan data kepegawaian dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Saat ini masih dalam proses pembaruan fitur/penyesuaian kebutuhan Pemkot Bontang.

Pada luaran (output) tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari penerapan SIMGAJI oleh Pemerintah Kota Bontang dapat dicapai karena dapat mempermudah tatakelola gaji bagi pegawai ASN walaupun masih terdapat kelemahan.

### **Faktor Penghambat Penerapan Sistem Informasi Manajemen Gaji**

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa kendala yang saat ini belum bisa diatasi adalah :

- 1) Fitur-fitur yang tersedia belum bisa mengakomodir sistem input yang otomatis sehingga proses pemberkasan lebih cepat dan efisien serta dan fitur SIMGAJI
- 2) Belum ada notif yang dapat memberikan informasi kepada admin jika ada pegawai yang telah melaksanakan cuti besar, hukuman disiplin dan tugas belajar.



Gambar 6

Belum Ada Fitur Tambah dalam SIMGAJI

Sumber : Website SIMGAJI

## Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa hal, sebagaimana fokus penelitian sebelumnya sebagai berikut :

### 1.Penerapan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI)

a.Pada tahap awal dari SIMGAJI (input) dalam penyediaan kebutuhan dasar secara keseluruhan sudah cukup baik karena sumberdaya yang dimiliki sebagian besar telah memadai baik manusia, keuangan, sarana, mesin dan metode.

b.Tahap proses yang terdiri dari tahap perencanaan yang dilakukan adalah penetapan operator, mempersiapkan SOP, mengintegrasikan data dapat dilaksanakan dengan baik. Namun pada tahap pengorganisasian masih terdapat kendala dalam pemberkasan atau masih juga ada admin yang tidak maksimal dalam melakukan tupoksinya. Pada fungsi pelaksanaan sudah dilakukan dengan baik dan berjalan sebagaimana mestinya kemudian pada tahap pengawasan juga tidak ditemukan kendala dan berjalan dengan baik.

c.Pada tahap luaran (output) dari SIMGAJI yaitu rekap dan daftar gaji, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), SPT Pajak Tahunan, hal ini telah mencapai tujuan utama dari penerapan SIMGAJI oleh Pemerintah Kota Bontang yaitu dapat mempermudah tatakelola gaji bagi pegawai ASN dan meminimalisir terjadinya kesalahan.

### 2.Faktor Penghambat Penerapan Sistem Informasi Manajemen Gaji

a.Fitur-fitur yang tersedia belum bisa mengakomodir sistem input yang otomatis sehingga proses pemberkasan lebih cepat dan efisien serta dan fitur SIMGAJI

b.Belum ada notif yang dapat memberikan informasi kepada admin jika ada pegawai yang telah melaksanakan cuti besar, hukuman disiplin dan tugas belajar.

Rekomendasi:

a.Perlu nya meningkatkan fitur-fitur yang ada, sehingga bisa sehingga bisa mengakomodir system input otomatis

b.Perlu membuat mengembangkan sistem yang ada, sehingga bisa memberikan notif Ketika ada pegawai yang cuti besar, hukuman disiplin dan tugas belajar.

### Daftar Pustaka

- Efendi, T. F. (2020). ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE SIMPLE SALARY SIM APPLICATION IN GROGOL DISTRICT, SUKOHARJO DISTRICT. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(4).
- Hamizan, A., Mayasari, M., Saputri, R., & Pohan, R. N. (2020). Sistem Informasi Penggajian di PT. Perkebunan Nusantara IV. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 10(1), 29–38.
- Kustini, Ketut Tanti. 2022. *Sistem Informasi Manajemen*. Editor Paput Tri Cahyono. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Mulyani, S., Sidik, A., & Sari, A. (2020). Sistem Informasi Aplikasi Penggajian Karyawan Berbasis Web Pada PT Panca Cipta Abadi. *Jurnal Sisfotek Global*, 10(2), 96–101.
- Nur Wahidah, A. (2021). *Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Melalui Aplikasi Sistem Informasi Gaji PNS (SIM GAJI) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi*. Universitas Jambi.
- Podungge, E. S., & Widanta, D. M. M. (2020). Implementasi Sistem Informasi Gaji Pegawai Kantor Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. *Jurnal Elektronik Sistem Informasi Dan Komputer*, 4(1), 63–74.
- Suripatty, H. J. (2020). Sistem informasi penggajian pada kantor dinas pendidikan dan pengajaran kabupaten nabire. *Jurnal FATEKSA: Jurnal Teknologi Dan Rekayasa*, 5(1), 14–21.
- Taman, A. (2019). Sistem Informasi Manajemen Penggajian dan Penilaian Kinerja Pegawai pada SMK Taman Siswa Lampung. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, 6(4).
- Yoraeni, Ani. 2023. *Sistem Informasi Manajemen*. Din, Sayyid Jamal Al (editor) Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya.